

RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2023



**“KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF
MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN”**

SEKRETARIAT DPRD
KOTA BEKASI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya, Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang disusun oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2021. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam mencapai tujuan organisasi sesuai dengan VISI dan MISI serta arahan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis dalam satu pola sikap dan tindak.


Rencana Kerja (RENJA) juga merupakan sebagai landasan operasional penyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2023 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi pada Tahun 2021.

Kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 ini kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan memberkahi langkah serta upaya kita dalam meningkatkan kinerja guna mewujudkan “Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan”.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal Desember 2022

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



Drs. HANAN, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19640424 199011 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI	9
 TAHUN 2021	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi	9
2.2 Analisis Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	12
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI	17
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih Tahun 2018-2023	19
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI	34
4.1 Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi	34
BAB V PENUTUP	63
Penutup	63

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Tahunan. Dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi. RKPD Kota Bekasi Tahun 2021 berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan dan penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang Tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan RENJA Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2022 menyusun Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 dibuat berdasarkan RENSTRA Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat di selesaikan dan memuat Program/ Kegiatan Prioritas Pembangunan yang akan di laksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun berjalan.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun

2023 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh Aparat Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk melaksanakan tugasnya menjalankan Program dan Kegiatannya guna mencapai target Kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam Rencana Strategis Perubahan (RENSTRA Perubahan) dan dapat tercapai dengan baik serta diharapkan pula dapat terpantau dan terevaluasi sejauh mana pencapaian Tujuan dan Sasaran dari tahun ke tahun sehingga dapat dilakukan koreksi jika terjadi perkembangan baru dilingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan proses penetapan Kegiatan Tahunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD dan Indikator Kinerja berdasarkan Program Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RENSTRA Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dan menentukan target yang realistis, oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini dicantumkan Program dan Kegiatan yang terinci untuk Jangka Pendek sebagai pedoman dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi serta langkah-langkah Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, sehingga capaian target apa saja yang belum tercapai pada tahun 2013-2018.

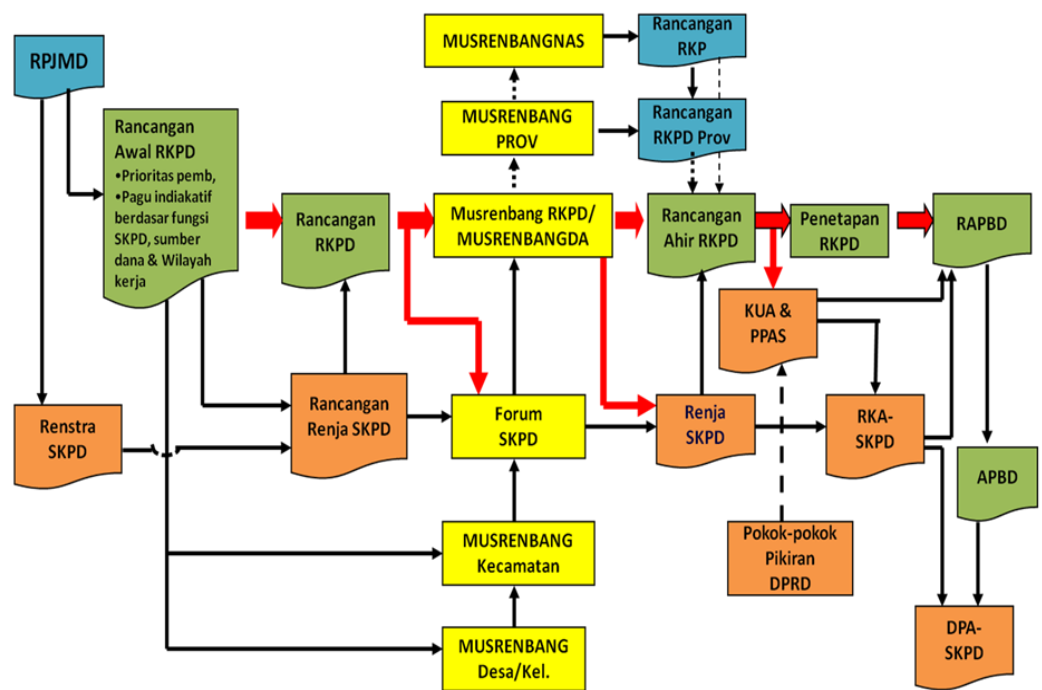
Keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan lain seperti RKPD dan Renstra OPD sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena Renja OPD merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan yang ada di atasnya seperti RKPD, Rensta OPD dan RPJMD. Renja OPD disusun oleh Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja digunakan sebagai dasar penyusunan rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk menyusun Anggaran Belanja Penempatan Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2021 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah,

karena Renja Sekretariat DPRD Tahun 2023 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2023.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2021, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selaras dengan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

ALUR PROSES PERENCANAAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH



Selanjutnya Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi Tahun 2023 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023. Di dalam penyusunan RENJA 2023 Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi mengacu Kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dan RENSTRA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi 2018-2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 43 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 52 Seri D);
11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 54 Seri E).

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah untuk mengetahui:

1. Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.
2. Lokasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.

3. Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.
4. Kelompok Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Pagu indikatif Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.
2. Mengevaluasi Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun sebelumnya.
4. Perumusan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.
5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023, proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA), keterkaitan antara RENJA Sekretariat DPRD dengan dokumen RKPD, RENSTRA Perubahan Sekretariat DPRD, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan tujuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023.

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

II.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun $n-2$) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya.

II.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang lalu.

II.4. Review terhadap Rancangan RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat do0 rancangan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbentuk Lampiran table.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

III.2. Telaahan Visi dan Misi serta Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih 2018-2023

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah, Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan Misi ke-1 **“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang**

Baik”.

III.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu Indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan (misal : pencapaian visi dan misi kepala daerah);
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain : jumlah program, dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi lokasi program dan kegiatan dan total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan;
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya;
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2021

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dinilai berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2021 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Untuk mencapai keberhasilan RPJMD maka dapat kita dilihat dari capaian indikator yang ada pada RENSTRA Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang terdapat pada tabel berikut ini :

EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SKPD SEKRETARIAT DPRD KOTA PADA RPJMD
MURNI 2018-2023

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	76,61	76,71	-	-	-	76,78	76,98	-	-	-
	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	50	50	-	-	-	100	100	-	-	-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,61	76,71	-	-	-	82,46	84,71	-	-	-

EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SKPD SEKRETARIAT DPRD KOTA PADA RPJMD
Perubahan 2018-2023

NO	INDIKATOR SASARAN	IKU	TARGET RENSTRA SKPD (%)					REALISASI CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75.10	75.20	-	-	87,51		

Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100		
Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100		
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-	77,4	77,5	77,6	-	-	69,56		

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam rangka mencapai misi organisasi.

Kinerja yang telah dicapai pemerintah Kota Bekasi berupa pencapaian sasaran yang menjadi tanggung-jawab Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja terutama target tahun 2021 sebanyak 4 (tiga) buah sasaran. Dengan rincian sebagai berikut :

A. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu ”dilakukan melalui: Jumlah Raperda yang diusulkan baik itu dari OPD teknis terkait maupun dari aspirasi DPRD di bagi Perda yang disahkan tepat waktu di kali 100 % dan sudah di Paripurnakan. Dan di buat laporannya dalam bentuk Daftar Raperda yang sudah di Paripurnakan.

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah Kota Bekasi Terpilih 2018-2023, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan mendukung pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih terutama di Misi Pertama yaitu:

“Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik” sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi.

B. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dimana Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir November.

C. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Perhitungan IKU untuk “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” dilakukan sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

D. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Perhitungan nilai AKIP terdiri dari Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja.

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	Realisasi	
1	Prosentase Raperda yang difinalisasikan menjadi Perda tepat waktu	Indeks	75%	87,51%	116,68%

Sumber : Data Olahan Bagian Program dan Keuangan, Setwan, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target penyelesaian Raperda TA 2021 yang disahkan menjadi Perda tepat waktu sejumlah 16 Perda. Dalam perjalanan target awal pembahasan Raperda di TA 2021 sejumlah 15 Raperda. Namun di bulan Oktober terdapat usulan judul Raperda sehingga target pembahasan Raperda di TA 2021 menjadi 16 Judul.

Pansus yang bertugas menyelesaikan pembahasan ini sudah menyelesaikan 14 judul Raperda sedangkan 2 Raperda tersisa sudah masuk tahap pembahasan dan direncanakan diselesaikan selambatnya pada bulan Februari TA 2022.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

Jumlah Perda yang disahkan
Raperda yang diusulkan

X 100%

Target Penyelesaian: 16 judul Raperda

Realisasi: 14 judul Raperda

Perhitungan: $\frac{14}{16}$

X 100% = 87,51%

Realisasi penyelesaian melampui dari target sejumlah 12,51% dengan tingkat capaian sebesar 116,68%

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya perubahan pola pikir (*mindset*) dari DPRD Kota Bekasi representasi pelaksanaan Pendalaman Tugas

- DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi sehingga meningkatnya pemahaman DPRD terhadap tugas dan fungsinya.
- b. Sinergitas yang baik antara DPRD Kota Bekasi dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memfasilitasi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2020
2	Prosentase Pengesahan Anggaran	Persen	100%	100%	133,33%

Sumber : Data Olahan Bagian FPP Setwan, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target penyelesaian pengesahan anggaran TA 2021 tepat waktu sejumlah 100%.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

Pengesahan APBD
Pengesahan APBD dan LP2APBD

X 100%

Target Penyelesaian: 2 Raperda

Realisasi: 2 Raperda

Perhitungan: $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$

Realisasi penyelesaian sesuai dengan target dengan tingkat capaian sebesar 100%

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-

- undangan;
- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan pengesahan Raperda yang ada.

Analisis Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2020
3	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen	100%	100%	133,33%

Sumber : Data Olahan Bagian FPP Setwan, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target penyelesaian pembahasan LKPJ Kepala Daerah TA 2021 tepat waktu sejumlah 100%.

Rumusan dalam menghitung capaian tersebut sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pembahasan LKPJ Rekomendasi LKPJ oleh DPRD diserahkan tepat waktu}}{\text{Target Penyelesaian: 1 LKPJ}} \times 100\%$$

Target Penyelesaian: 1 LKPJ
Realisasi: 1 Dokumen Rekomendasi LKPJ

$$\text{Perhitungan: } \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi penyelesaian sesuai dengan target dengan tingkat capaian sebesar 100%

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Adanya komitmen DPRD dalam pelaksanaan tugas dan

- fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait penyampaian, pembahasan dan pengesahan Raperda yang ada.

Analisis Nilai AKIP Perangkat Daerah

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2020
4	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,4	69,56	89,87%

Sumber : Data Olahan Bagian FPP Setwan, 2021

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa realisasi nilai AKIP Perangkat Daerah 69,56 dari target nilai 77,4 dengan tingkat capaian 89,87%.

Rumusan dalam menghitung Nilai AKIP sebagai berikut:

Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja Target

Perhitungan: $25,86 + 17,50 + 11,59 + 8,02 + 6,58 = 69,56$

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 dipengaruhi oleh komitmen dan sinergitas dari seluruh Aparatur di lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi s/d Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat DPRD Kota Bekasi

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET RENJA	REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI FISIK
1					2	3		4	5	6	7
4	02	01			Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD					
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel					
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	23 Dokumen	50.000.000	7.555.400	15.11	95.45
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan	3 Dokumen	20.000.000	5.613.800	28.07	100.00
4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD					
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terfasilitasinya administrasi keuangan Perangkat Daerah					
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji ASN dan Premi BPJS	720 Orang/ Bulan	10.959.864.000	10.497.209.059	95.78	87.81
						Jumlah Pembayaran Tunjangan ASN					
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	2 Dokumen	10.000.000	4.250.000	42.50	100.00

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET RENJA	REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI FISIK
1					2	3		4	5	6	7
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD dan DPRD	24 Dokumen	10.000.000	5.266.000	52.66	100.00
						Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan DPRD	4 Dokumen				
						Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan SKPD dan DPRD	8 Dokumen				
4	02	01				Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD					
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi	239 set	700.000.000	525.116.000	75.02	100.00
						Jumlah Pakaian Dinas, Olah Raga dan Batik bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi	691 Stel/buah				
4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD					
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	59 Orang	500.000.000	220.845.000	44.17	75.00
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Workshop Nasional, Munas, Rakernas, Rakornas	63 Orang	736.665.000	418.657.752	56.83	85.00
4	02	01				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD					
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah					
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2383 Unit	50.000.000	48.412.500	96.83	96.83
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55 Unit	7.399.111.000	5.922.070.200	80.04	45.51

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET RENJA	REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI FISIK
1					2	3		4	5	6	7
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer	4491 Unit, 84158 Pak	3.732.243.000	1.489.860.650	39.92	51.61
						Jumlah Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat-rapat, Kegiatan Lainnya, Tamu Kunjungan Kerja dan Pengamanan Unras					
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang	4952 Unit	1.355.642.250	807.259.000	59.55	19.72
						Jumlah Barang Cetak	236968 Lembar				
						Jumlah Penggandaan					
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26200 Buku/ Eksemplar	632.200.000	364.588.000	57.67	50.00
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah/ Perjalanan Dinas	14 Kali	550.000.000	377.104.385	68.56	70.00
4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			200.000.000	99.000.000	49.50	0.00
4	02	01				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD					
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah					
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen surat terkirim	1002 Surat/ Paket	25.000.000	6.000.000	24.00	90.00
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik	143 Unit	750.000.000	545.927.271	72.79	65.93
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Retribusi Jasa Kebersihan Kantor	1248 Orang/ Bulan	5.683.824.000	5.239.895.114	92.19	58.67
						Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran					
4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD					
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah					

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET RENJA	REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI FISIK
1					2	3		4	5	6	7
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	4 Unit	200.000.000	51.488.590	25.74	10.64
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	37 Unit	350.000.000	229.833.147	65.67	27.81
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair	250 Unit	50.000.000	42.000.000	84.00	0.00
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	211 Unit	400.000.000	206.533.500	51.63	25.86
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara	24757 M2	4.200.000.000	3.619.461.482	86.18	65.22
4	02	02				Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD					
4	02	02	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
4	02	02	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Pembayaran Gaji Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi		49.507.950.000	46.010.061.368	92.93	94.70
4	02	02	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian dan Atribut		700.000.000	554.160.000	79.17	100.00
4	02	02	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terfasilitasinya Pelayanan Kesehatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD					
4	02	02	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up		150.000.000	114.000.000	76.00	0.00
4	02	02	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Terfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4	02	02	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, HUT Kota Bekasi dan HUT RI	22 Kali	900.000.000	498.744.000	55.42	100.00

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET RENJA	REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI FISIK
1					2	3		4	5	6	7
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA					
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terbentuknya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah					
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Produk Hukum (Raperda Inisiatif, Propemperda)	14 Produk Hukum	6.027.520.000	2.694.433.187	44.70	80.44
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah	15 Raperda	8.200.000.000	1.629.868.777	19.88	72.00
4	02	02				Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD					
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD					
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD	1 Dokumen	840.000.000	591.136.079	70.37	100.00
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	1 Dokumen	840.000.000	462.680.151	55.08	100.00
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD Murni	1 Dokumen	840.000.000	241.889.781	28.80	100.00
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	1 Dokumen	840.000.000	371.505.885	44.23	100.00
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen LRA Semester I dan Prognosis APBD sampai Akhir Tahun	1 Dokumen	840.000.000	355.506.245	42.32	100.00
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	540.000.000	242.882.903	44.98	100.00
4	02	02				Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD					
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD					
4	02	02	2.03	01	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	7 Dokumen	2.140.515.800	1.380.361.472	64.49	100.00
4	02	02	2.03	02	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	7 Dokumen	1.990.746.050	1.384.756.126	69.56	100.00

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET RENJA	REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI FISIK
1					2	3		4	5	6	7
4	02	02	2.03	03	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	7 Dokumen	2.069.746.050	1.231.291.532	59.49	100.00
4	02	02	2.03	04	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	7 Dokumen	1.706.836.050	1.100.682.970	64.49	100.00
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rekomendasi DPRD atas Tindakanlanjut LHP BPK	1 Dokumen	1.000.000.000	581.185.418	58.12	100.00
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Rekomendasi DPRD atas Kebijakan Anggaran DPRD	1 Dokumen	2.500.000.000	1.249.324.566	49.97	100.00
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD Kota Bekasi	-				
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Peserta Bimtek/Workshop/Raker/Seminar	300 Orang	6.254.035.000	3.077.680.436	49.21	85.00
						Jumlah Peserta Workshop Nasional, Munas, Rakernas					
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kajian	18 Kali/ Kajian	2.550.000.000	2.248.536.390	88.18	91.18
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Kajian/Telaahan Kelompok Pakar/Tenaga Ahli Fraksi	0				
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Adikarya Parlemen/ Pemberitaan Personal	8 Kali	7.560.500.000	1.612.004.250	21.32	84.38
						Jumlah Baliho					
						Jumlah Kalender					
						Jumlah kegiatan Coffee Morning					
						Jumlah kegiatan Media Gathering					
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Hasil Pembahasan Agenda Renja DPRD dan Evaluasi Renja DPRD	1 Dokumen	1.100.000.000	913.019.779	83.00	96.00
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah					

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET RENJA	REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI FISIK
1					2	3		4	5	6	7
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kunjungan Kerja Dalam Daerah	1 Dokumen	500.000.000	166.500.000	33.30	100.00
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 Dokumen	1.500.000.000	1.119.584.815	74.64	100.00
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Laporan Reses DPRD	1 Dokumen	8.350.000.000	5.696.510.200	68.22	100.00
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Internal DPRD					
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Dokumen	800.170.000	356.801.773	44.59	83.33
4	02	02				Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD					
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerjasama Daerah	Terpublikasinya Kegiatan DPRD Kota Bekasi	-				
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Baliho	30 Unit Baliho, 4000 eksemplar, 50 kali, 7 unit, 950 unit, 68 kali	5.081.000.000	3.193.868.868	62.86	78.11
						Jumlah Majalah					
						Jumlah Peliputan					
						Jumlah Souvenir					
						Kerjasama Media Cetak					
						Kerjasama Media Elektronik					
						Pemeliharaan Website					
4	02	02				Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD					
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan Pimpinan DPRD	-				
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD ke Luar Daerah dan Luar Negeri	23 Kali	750.000.000	350.532.958	46.74	72.50

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		TARGET RENJA	REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI RENJA	TINGKAT REALISASI FISIK
1					2	3		4	5	6	7
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Pimpinan, Rapat Badan Musyawarah dan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Paripurna HUT RI serta Paripurna HUT Kota Bekasi	70 Kali	4.000.000.000	1.730.774.417	43.27	91.16
								158.643.568.200	111.894.231.196	70.53	92.80

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD digunakan indikator sasaran, program, dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi serta hasil analisis standar kebutuhan pelayanan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Berikut pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Berdasarkan Kajian terhadap capaian kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran Tabel T-C.30

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

NO	INDIKATOR SASARAN	IKU	TARGET RENSTRA SKPD (%)					REALISASI CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75.10	75.20	-	-	87,51		
	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100		
	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2	-	-	100		

NO	INDIKATOR SASARAN	IKU	TARGET RENSTRA SKPD (%)					REALISASI CAPAIAN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	-	-	77,4	77,5	77,6	-	-	69,56		

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masadatang.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi baik internal maupun eksternal, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka

untuk penentuan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah di dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya, Setwan menghadapi permasalahan sebagai berikut:

a) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional,

Di dalam menjalankan perannya, Setwan menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Disisi lain, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Setwan saat ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya masih belum mencukupi. Kebutuhan Setwan dalam menjalankan tugasnya banyak membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika, bidang ekonomi dengan disiplin ilmu akuntansi, manajemen dan ilmu ekonomi, manajemen strategis dan perencanaan, dan bidang hukum.

Keterbatasan sarana dan pra sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kecepatan internet, kondisi saat ini kapasitas internet di Sekretariat DPRD masih minim, tentunya menjadi keluhan anggota DPRD Kota Bekasi, untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukan penyediaan jaringan internet yang bebas hambatan dengan kecepatan maksimal. Selain jaringan internet sarana pendukung lainnya adalah komputer. Sarana yang ada saat

ini masih ada beberapa aparaturnya Sekretariat DPRD yang menggunakan komputer dengan spesifikasi rendah sehingga agak menghambat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

b) Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal

Jadwal Agenda DPRD sebelumnya sudah ditetapkan dan dituangkan ke dalam berita acara, namun implementasinya agenda DPRD tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Hal ini berdampak pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan.

c) Kurang optimalnya dalam melaksanakan program dan kegiatan

Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta sering berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat mengakibatkan mempengaruhi terhadap kinerja Sekretariat DPRD.

Padatnya jadwal kegiatan DPRD mengakibatkan jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disepakati ada kalanya tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal hal ini disebabkan banyaknya kegiatan di luar dari kegiatan Sekretariat DPRD sehingga kegiatan yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana karena berbenturan waktu dengan kegiatan yang lain.

TABEL PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD Kota Bekasi	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional	- Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui Diklat; - Aparatur Sekretariat DPRD yang memiliki kompetensi terbatas - Belum adanya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			funksional tertentu di Sekretariat DPRD yang sesuai kebutuhan
		Keterbatasan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK)	<div><div>-</div>Pengadaan sarana prasarana TIK PD belum merata</div> <div><div>-</div>Anggaran Belanja TIK Terbatas</div>
		Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal	<div><div>-</div>Draf Usulan Rancangan Perundangan yang terlambat disampaikan oleh PD</div> <div><div>-</div>Kurang Komitmen terhadap jadwal kerja yang sudah ditetapkan dalam 1 tahun anggaran</div>
		Kurang optimalnya dalam melaksanakan program dan kegiatan	<div><div>-</div>Perubahan Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang terlalu cepat</div> <div><div>-</div>Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD</div> <div><div>-</div>Banyaknya kegiatan diluar Tupoksi DPRD</div> <div><div>-</div>Padatnya jadwal kegiatanDPRD</div>

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2023, Sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan. Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen RKPD baik jumlah program/kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut:

TABEL T-C.31. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

Sub Kegiatan		Pagu Rencana Awal	Pagu Sebelum Desk	Desk I	Pagu Validasi	Desk II	Pagu Final	Keterangan
4.02 SEKRETARIAT DPRD								
01.00 Sekretariat DPRD		260.831.001.225	204.000.000.000	- 1.401.083.436	202.598.916.564	676.289.000	201.975.374.890	Efisiensi
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		122.481.641.225	93.622.486.040	5.076.053.436	88.546.432.604	200.000.000	92.011.379.930	Efisiensi
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		634.375.000	634.375.000	233.560.000	400.815.000	50.000.000	245.815.000	
1	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	625.000,000	625.000.000	- 585.000.000	40.000.000		40.000.000	
2	4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.375,000	9.375.000	351.440.000	360.815.000	50.000.000	205.815.000	Efisiensi
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.923.375.000	11.141.200.000	431.790.000	11.572.990.000	50.000.000	11.365.790.000	
3	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.910.875,000	1.128.700.000	-	11.128.700.000		11.128.700.000	
4	4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.500,000	12.500.000	431.790.000	444.290.000	50.000.000	237.090.000	Efisiensi
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.022.937.500	1.218.350.000	- 498.350.000	720.000.000	100.000.000	620.000.000	
5	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		400.000.000	- 400.000.000			0	Ditiadakan
6	4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	372.937.500	298.350.000	- 98.350.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	Efisiensi

Sub Kegiatan		Pagu Rencana Awal	Pagu Sebelum Desk	Desk I	Pagu Validasi	Desk II	Pagu Final	Keterangan
7	4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	650.000.000	20.000.000	-	520.000.000		520.000.000	
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.651.203.750	5.477.329.562	233.800.000	5.711.129.562		5.502.329.562	
8	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.500,000	50.000.000	25.000.000	75.000.000		75.000.000	Penambahan Gedung Baru
9	4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.467.453,750	.637.763.000	104.400.000	2.742.163.000		2.637.763.000	
10	4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	625.000,000	29.116.562	-	429.116.562		429.116.562	
11	4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	725.000,000	80.000.000	104.400.000	684.400.000		580.000.000	
12	4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.440.562,500	.152.450.000	-	1.152.450.000		1.152.450.000	
13	4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.330.687,500	28.000.000	-	628.000.000		628.000.000	
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.100.000.000	1.300.000.000	-	1.300.000.000		1.300.000.000	
14	4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.100.000,000	1.300.000.000	-	1.300.000.000		1.300.000.000	
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.827.312.475	6.742.531.478	- 4.503.600.000	2.238.931.478		6.741.178.804	
15	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.500,000	50.000.000	934.800.000	984.800.000		50.000.000	
16	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000,000	950.000.000	-	950.000.000		950.000.000	

Sub Kegiatan		Pagu Rencana Awal	Pagu Sebelum Desk	Desk I	Pagu Validasi	Desk II	Pagu Final	Keterangan
17	4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.014.812,475	5.742.531.478	- 5.438.400.000	304.131.478		5.741.178.804	
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.562.500.000	8.500.750.000	- 610.233.436	7.890.516.564		7.628.316.564	
18	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	375.000,000	300.000.000	-	300.000.000		300.000.000	
19	4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	687.500,000	550.000.000	52.200.000	602.200.000		550.000.000	
20	4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	125.000,000	100.000.000	-	100.000.000		100.000.000	
21	4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	375.000,000	300.000.000	-	300.000.000		300.000.000	
22	4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,000	7.250.750.000	- 662.433.436	6.588.316.564		6.378.316.564	Efisiensi
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		79.822.437.500	57.857.950.000	104.100.000	57.962.050.000		57.857.950.000	
23	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	78.759.937,500	57.007.950.000	104.100.000	57.112.050.000		57.007.950.000	
24	4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	875.000,000	700.000.000	-	700.000.000		700.000.000	
25	4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	187.500,000	150.000.000	-	150.000.000		150.000.000	
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		937.500.000	750.000.000	-	750.000.000		750.000.000	

Sub Kegiatan		Pagu Rencana Awal	Pagu Sebelum Desk	Desk I	Pagu Validasi	Desk II	Pagu Final	Keterangan
26	4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	937.500,000	750.000.000	-	750.000.000		750.000.000	
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		138.349.360.000	110.377.513.960	3.674.970.000	114.052.483.960	476.289.000	109.963.994.960	
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		24.000.000.000	19.200.000.000	420.600.000	19.620.600.000		19.200.000.000	
27	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.250.000,000	1.000.000.000	104.400.000	1.104.400.000		1.000.000.000	
28	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10.937.500,000	8.750.000.000	105.600.000	8.855.600.000		8.750.000.000	
29	4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	4.062.500,000	3.250.000.000	105.000.000	3.355.000.000		3.250.000.000	
30	4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	7.187.500,000	5.750.000.000	105.600.000	5.855.600.000		5.750.000.000	
31	4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	562.500,000	450.000.000	-	450.000.000		450.000.000	
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		7.875.000.000	6.300.000.000	244.600.000	6.544.600.000		6.300.000.000	
32	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	1.312.500,000	1.050.000.000	61.150.000	1.111.150.000		1.050.000.000	
33	4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.312.500,000	1.050.000.000	30.575.000	1.080.575.000		1.050.000.000	
34	4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	1.312.500,000	1.050.000.000	61.150.000	1.111.150.000		1.050.000.000	
35	4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	1.312.500,000	1.050.000.000	30.575.000	1.080.575.000		1.050.000.000	
36	4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	1.312.500,000	1.050.000.000	30.575.000	1.080.575.000		1.050.000.000	

Sub Kegiatan		Pagu Rencana Awal	Pagu Sebelum Desk	Desk I	Pagu Validasi	Desk II	Pagu Final	Keterangan
37	4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.312.500,000	1.050.000.000	30.575.000	1.080.575.000		1.050.000.000	
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		10.585.085.000	26.864.096.960	856.100.000	27.720.196.960		26.864.096.960	
38	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	112.650,000	4.689.127.240	210.000.000	4.899.127.240		4.689.127.240	
39	4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	112.650,000	4.689.127.240	105.000.000	4.794.127.240		4.689.127.240	
40	4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	112.650,000	4.689.127.240	209.400.000	4.898.527.240		4.689.127.240	
41	4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	112.650,000	4.689.127.240	209.400.000	4.898.527.240		4.689.127.240	
42	4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.875.750,000	1.500.600.000	30.575.000	1.531.175.000		1.500.600.000	
43	4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	5.187.500,000	4.150.000.000	91.725.000	4.241.725.000		4.150.000.000	
44	4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3.071.235,000	2.456.988.000	-	2.456.988.000		2.456.988.000	
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		29.295.252.500	22.802.189.000	1.110.000.000	23.912.189.000	476.289.000	22.860.900.000	
45	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	10.250.000,000	8.200.000.000	-	8.200.000.000		8.200.000.000	
46	4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	62.500,000	50.000.000	-	50.000.000	0	0	Ditiadakan

Sub Kegiatan		Pagu Rencana Awal	Pagu Sebelum Desk	Desk I	Pagu Validasi	Desk II	Pagu Final	Keterangan
47	4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.432.015,000	2.521.612.000	105.600.000	2.627.212.000		2.521.612.000	
48	4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	720.000,000	576.000.000	105.600.000	681.600.000		576.000.000	
49	4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	14.580.737,500	10.454.577.000	313.800.000	10.768.377.000	476.289.000	9.978.288.000	Efisiensi
50	4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	1.250.000,000	1.000.000.000	585.000.000	1.585.000.000		1.585.000.000	Kegiatan Sinergitas DPRD dan OPD
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		14.059.750.000	12.447.800.000	469.200.000	12.917.000.000		12.447.800.000	
51	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	507.468,750	405.975.000	156.400.000	562.375.000		405.975.000	
52	4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	31.250,000	1.225.000.000	156.400.000	1.381.400.000		1.225.000.000	
53	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	13.521.031,250	10.816.825.000	156.400.000	10.973.225.000		10.816.825.000	
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		0	3.036.268.000	52.800.000	3.089.068.000		3.089.068.000	
54	4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	0	3.036.268.000	52.800.000	3.089.068.000		3.089.068.000	
4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah		4.312.500.000		-			0	
55	4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	4.312.500.000	-	-			0	
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD		48.221.772,500	19.727.160.000	521.670.000	20.248.830.000		19.202.130.000	
56	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	43.141.047,500	8.245.820.000	-	8.245.820.000		8.245.820.000	

Sub Kegiatan		Pagu Rencana Awal	Pagu Sebelum Desk	Desk I	Pagu Validasi	Desk II	Pagu Final	Keterangan
57	4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	625.000,000	500.000.000	157.500.000	657.500.000		500.000.000	
58	4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.174.437,500	9.156.310.000	367.200.000	9.523.510.000		9.156.310.000	
59	4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.281.287,500	1.825.030.000	- 3.030.000	1.822.000.000		1.300.000.000	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan.

Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musrenbang Tingkat Kota/Kabupaten. Pada tahap Forum PD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing PD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas

pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pada tahun 2023 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau dari masyarakat Kota Bekasi untuk Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perlu adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antarwaktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus selaras mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

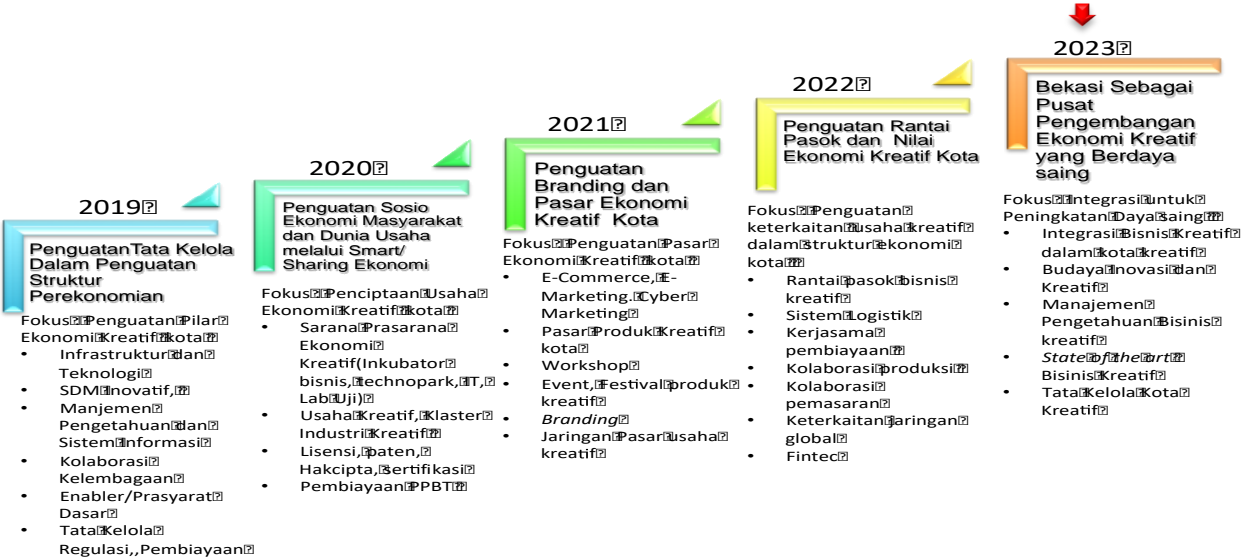
Pentingnya keselarasan atau sinkronisasi antara daerah dan tingkat nasional (pusat) karena pencapaian pembangunan nasional merupakan hasil agregat pencapaian berbagai daerah secara berjenjang dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Dengan kata lain, target pembangunan nasional mustahil tercapai apabila program pembangunan di daerah tidak sinkron atau tidak mendukung program pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian pembangunan tersebut diperlukan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan untuk memantapkan keterikatan antar tingkatan pemerintah dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan telaahan baik terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat (Nasional) maupun juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Di samping itu, perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat juga harus menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi. Maka, perlu dilakukan telaahan juga terhadap kebijakan provinsi yaitu penelaahan terhadap arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan daerah yang tertuang di dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023. Berikut tema dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

Dengan demikian, kebijakan nasional dan provinsi tersebut menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyusun rumusan arah dan tema prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi. Berikut tema dan prioritas pembangunan Kota Bekasi yang dituangkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2018-2023.

Tema Dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



Tahapan Tema Prioritas Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021-2023

Berdasarkan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2023 tersebut tema pembangunan dan fokus prioritas pembangunan Kota Bekasi tahun 2023 yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 adalah “**Konsolidasi Ketercapaian Hasil Pembangunan**”. Fokus prioritasnya terbagi ke dalam 4 (empat) pilar dan 1 (satu) enabler sebagaimana dalam bagan berikut:



Tahapan Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil.

Sesuai dengan tugas pokok Sekretariat DPRD dalam unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bekasi Tahun 2018-2023, yaitu Misi yang pertama “Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” dengan Tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel”, dan Sasaran dari Tujuan Misi I tersebut yaitu “Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah”.

Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah melakukan Revisi Renstra Tahun 2020-2023 sebanyak 1 (satu) kali berdasarkan hasil evaluasi Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam pemenuhan bahan penilaian SAKIP.

Selanjutnya perubahan dilakukan pada perubahan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan target sasaran strategis.

Tujuan : Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir tahun, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai.

Indikator Tujuan:

Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Indikator Sasaran:

1. Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD;
2. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu;
3. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD seperti tergambar pada tabel

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD 2018-2023

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	1. Indeks Kepuasan DPRD Terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			2. Meningkatnya Harmonisasi Kemitraan antara eksekutif dan legislatif	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	76,61	76,71	76,81	76,91	77
			3. Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD	3. Prosentase Raperda Tepat Waktu	50	50	50.10	50.10	50.15

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD 2018-2023 (PERUBAHAN)

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	-	-	75	75.10	75.20
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	-	-	75	75,1	75,2
				Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	-	-	75	75,1	75,2
				Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	-	77,4	77,5	77,6

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018-2023

OPD : SEKRETARIAT DPRD

VISI : MISI KE- SATU

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terwujudnya peningkatan pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam menunjang harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Terepenuhinya dukungan fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	<p>Hasil Survey</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan - NNR = Nilai Rata-rata - IKM = Indeks Kepuasan Anggota DPRD - *) = Jumlah NRR IKM Tertimbang - **) = Jumlah NNR Tertimbang x 25 <p>NRR Per Unsur = $\frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$</p> <p>NRR = NRR per unsur x 0,011</p>	Indeks	76,61	76,71	76,81	76,91	77,00

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	Persen	50	50	50.10	50.10	50.15
			Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Hasil Survey</p> <p>Rumus Perhitungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - U1 s.d U9 = Unsur Pelayanan - NNR = Nilai Rata-rata - IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat - *) = Jumlah NRR IKM Tertimbang - **) = Jumlah NNR Tertimbang x 25 <p>NRR Per Unsur = $\frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah kuesioner yang terisi}}$</p> <p>NRR = $\text{NRR per unsur} \times 0,011$</p>	Indeks	76,61	76,71	76,81	76,91	77.00

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU PERUBAHAN)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021-2023

OPD : SEKRETARIAT DPRD

VISI : MISI KE- SATU

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan Raperda yang diusulkan}}{\text{Jumlah Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	Persen (%)	50	50	75	75,10	75,20
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	$\frac{\text{Perda dan Perkada APBD/ LP2APBD yang disahkan}}{\text{Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu}} \times 100\%$	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2
				Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	$\frac{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah}}{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah tepat waktu}} \times 100\%$	Persen (%)	-	-	75	75,1	75,2

III.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”**. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi RPJMD Kota Bekasi 2018 - 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Ditinjau dari misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah misi ke-1 yaitu **“meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”**.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam Tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu menyelenggarakan pelayanan administrasi memberikan Pelayanan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode Tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Dengan demikian, untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 tersebut, Sekretariat DPRD melaksanakan program dan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD melalui Renstra Perubahan

Tahun 2021-2023 sampai dengan ditetapkan RPJMD Kota Bekasi melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BEKASI TERPILIH PERIODE TAHUN 2018-2023

Visi: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan				
No.	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik	Terlambatnya penetapan peraturan perundangan terkait dokumen perencanaan dan penganggaran usulan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Perangkat Daerah pengusul dokumen terlambat dalam mengajukan usulan untuk pembahasan	Adanya regulasi terkait penetapan peraturan perundangan
		Terlambatnya penetapan peraturan perundangan atas usulan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Perangkat Daerah pengusul raperda terlambat dalam mengajukan usulan untuk pembahasan	Adanya regulasi terkait penetapan peraturan perundangan
		Tidak sesuai nya jadwal persidangan dengan jadwal yang telah ditetapkan	Beberapa anggota DPRD belum seluruhnya mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan	Adanya regulasi terkait penetapan peraturan perundangan

Misi merupakan langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi Kota Bekasi. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memegang fungsi dan peran penting bagi Penghubung antara DPRD Kota

Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi harus mampu menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang terkelola dengan baik. Baik dari sisi pemberdayaan sumber daya internal dan pemanfaatan fasilitas dan kewenangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekretariat DPRD Kota Bekasi juga harus mampu melakukan perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran sehingga tujuanTerwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam RPJMD dapat tercapai, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam program kerja sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, direncanakan akan dilaksanakan 2 (dua) Program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan dengan 59 (lima puluh sembilan) sub Kegiatan.

Rencana Awal Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp 260.831.001.225,00 sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
	SEKRETARIAT DPRD	260.831.001.225
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	122.481.641.225
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	634.375.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	625.000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.375,000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.923.375.000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.910.875,000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.500,000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.022.937.500
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	372.937.500
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	650.000.000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.651.203.750

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.500,000
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.467.453,750
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	625.000,000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	725.000,000
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.440.562,500
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.330.687,500
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.100.000.000
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.100.000,000
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.827.312.475
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.500,000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000,000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.014.812,475
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.562.500.000
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	375.000,000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	687.500,000
20	Pemeliharaan Mebel	125.000,000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	375.000,000
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,000
VIII	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	79.822.437.500
23	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	78.759.937,500
24	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	875.000,000
25	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	187.500,000
IX	Layanan Administrasi DPRD	937.500.000
26	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	937.500,000
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	138.349.360.000
X	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	24.000.000.000
27	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.250.000,000
28	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10.937.500,000
29	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	4.062.500,000
30	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	7.187.500,000
31	Penyusunan Tata Tertib DPRD	562.500,000
XI	Pembahasan Kebijakan Anggaran	7.875.000.000
32	Pembahasan KUA dan PPAS	1.312.500,000
33	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.312.500,000
34	Pembahasan APBD	1.312.500,000
35	Pembahasan APBD Perubahan	1.312.500,000
36	Pembahasan Laporan Semester	1.312.500,000

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
37	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.312.500,000
XII	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	10.585.085.000
38	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	112.650,000
39	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	112.650,000
40	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	112.650,000
41	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	112.650,000
42	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.875.750,000
43	Pengawasan Penggunaan Anggaran	5.187.500,000
44	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3.071.235,000
XIII	Peningkatan Kapasitas DPRD	29.295.252.500
45	Pendalaman Tugas DPRD	10.250.000,000
46	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	62.500,000
47	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.432.015,000
48	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	720.000,000
49	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	14.580.737,500
50	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.250.000,000
XIV	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	14.059.750.000
51	Kunjungan Kerja dalam Daerah	507.468,750
52	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	31.250,000
53	Pelaksanaan Reses	13.521.031,250
XV	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	0
54	Pengawasan Kode Etik DPRD	0
XVI	Pembahasan Kerja Sama Daerah	4.312.500.000
55	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	4.312.500.000
XVII	Fasilitasi Tugas DPRD	48.221.772,500
56	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	43.141.047,500
57	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	625.000,000
58	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.174.437,500
59	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.281.287,500

Sedangkan Rencana Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk Tahun Anggaran 2023 sejumlah Rp 201.975.374.890,00 sebagai berikut:

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
	SEKRETARIAT DPRD	201.975.374.890
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	92.011.379.930
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.815.000

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	205.815.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.365.790.000
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.128.700.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	237.090.000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	620.000.000
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	520.000.000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.502.329.562
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.637.763.000
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	429.116.562
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	580.000.000
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.152.450.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	628.000.000
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.300.000.000
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.300.000.000
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.741.178.804
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000.000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	950.000.000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.741.178.804
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.628.316.564
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300.000.000
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	550.000.000
20	Pemeliharaan Mebel	100.000.000
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.378.316.564
VIII	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	57.857.950.000
23	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	57.007.950.000
24	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	700.000.000
25	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000
IX	Layanan Administrasi DPRD	750.000.000
26	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	750.000.000
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	109.963.994.960

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
X	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	19.200.000.000
27	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.000.000.000
28	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8.750.000.000
29	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	3.250.000.000
30	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	5.750.000.000
31	Penyusunan Tata Tertib DPRD	450.000.000
XI	Pembahasan Kebijakan Anggaran	6.300.000.000
32	Pembahasan KUA dan PPAS	1.050.000.000
33	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.050.000.000
34	Pembahasan APBD	1.050.000.000
35	Pembahasan APBD Perubahan	1.050.000.000
36	Pembahasan Laporan Semester	1.050.000.000
37	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.050.000.000
XII	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	26.864.096.960
38	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4.689.127.240
39	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4.689.127.240
40	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.689.127.240
41	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.689.127.240
42	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.500.600.000
43	Pengawasan Penggunaan Anggaran	4.150.000.000
44	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2.456.988.000
XIII	Peningkatan Kapasitas DPRD	22.860.900.000
45	Pendalaman Tugas DPRD	8.200.000.000
46	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	-
47	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.521.612.000
48	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	576.000.000
49	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	9.978.288.000
50	Penyusunan Program Kerja DPRD	1.585.000.000
XIV	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12.447.800.000
51	Kunjungan Kerja dalam Daerah	405.975.000
52	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.225.000.000
53	Pelaksanaan Reses	10.816.825.000
XV	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	3.089.068.000
54	Pengawasan Kode Etik DPRD	3.089.068.000
XVI	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-
55	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	-
XVII	Fasilitasi Tugas DPRD	19.202.130.000
56	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8245820000
57	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	500000000
58	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	9156310000

NO	SUB KEGIATAN	PAGU
59	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1300000000

Rumusan program dan kegiatan di Tahun 2023 telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, namun terdapat penurunan di dalam Pagu Final sebesar Rp 58.855.626.335,00 (22,56%) yang semula Rp 260.831.001.225,00 menjadi Rp 201.975.374.890,00.

Secara rinci berikut adalah program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2023:

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2021		2022		2023				TARGET	RP
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	02	01			Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD											
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD,Evaluasi Renja DPRD Tahun 2022,Dokumen Renja DPRD,Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat,Dokumen Laporan Evaluasi Capaian Kinerja,Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD,Dokumen Renstra 2018-2023,Sinergitas DPRD dengan OPD	Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	23 Dokumen	500.000,00	25 Dokumen	500.000,00	25 Dokumen	625.000,00	25 Dokumen	625.000,00	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel	3 Dokumen	40.000,00	3 Dokumen	7.500,00	3 Dokumen	9.375,00	3 Dokumen	9.375,00	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD											

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2021		2022		2023		TARGET	RP		
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Daerah												
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Terfasilitasinya administrasi keuangan Perangkat Daerah	720 Orang/ Bulan	12.509.864,00	55 Orang/ Bulan	11.128.700,00	55 Orang/ Bulan	13.910.875,00	55 Orang/ Bulan	13.910.875,00	Bagian Program dan Keuangan	
						Jumlah Orang Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/ Bulan		55 Orang/ Bulan		55 Orang/ Bulan			
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan DPRD	Terfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.000,00	1 Dokumen	10.000,00	1 Dokumen	12.500,00	1 Dokumen	12.500,00	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD dan DPRD	Terfasilitasinya administrasi keuangan Perangkat Daerah	24 Dokumen	10.000,00	12 Dokumen	0,00	12 Dokumen	0,00	12 Dokumen	0,00	Bagian Program dan Keuangan	
						Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan DPRD		4 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
						Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan SKPD dan DPRD		8 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
4	02	01				Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD											
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	239 set	700.000,00	239 set	0,00	239 set	0,00	239 set	0,00	Bagian Program dan Keuangan	
						Jumlah Pakaian Dinas, Olah Raga dan Batik bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi		691 Stel/buah		691 Stel/buah		691 Stel/buah		691 Stel/buah			
4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD											

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2021		2022		2023		TARGET	RP		
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59 Orang	500.000,00	40 Orang	298.350,00	50 Orang	372.937,50	50 Orang	372.937,50	Bagian Umum	
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Workshop Nasional, Munas, Rakernas, Rakornas Sekretariat DPRD, Workshop Nasional	Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pada Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63 Orang	736.665,00	49 Orang	520.000,00	49 Orang	650.000,00	49 Orang	650.000,00	Bagian Umum	
4	02	01				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD											
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	2383 Unit	50.000,00	2383 Unit	50.000,00	2500 Unit	62.500,00	2500 Unit	62.500,00	Bagian Umum	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	55 Unit	3.545.000,00	55 Unit	0,00	55 Unit	0,00	55 Unit	0,00	Bagian Umum	
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	Bagian Umum	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer	Terlaksananya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	4491 Unit, 84158 Pak	3.732.243,00	5064 Unit	2.773.963,00	6187 Unit	3.467.453,75	6187 Unit	3.467.453,75	Bagian Umum	
					Jumlah Makanan dan Minuman Pimpinan, Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Pengamanan Unras					50970 Pack		88158 Pak		88158 Pak			

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2021		2022		2023		TARGET	RP		
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan	Terlaksananya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	4952 Unit	500.000,00	4952 Unit	500.000,00	6190 Unit	625.000,00	6190 Unit	625.000,00	Bagian Umum	
						Jumlah Penggandaan/ Penjilidan		236968 Lembar		236968 Lembar		296210 Lembar		296210 Lembar			
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	26200 Buku/ Eksemplar	580.000,00	26200 Buku/ Eksemplar	580.000,00	28500 Buku/ Eksemplar	725.000,00	28500 Buku/ Eksemplar	725.000,00	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum kunjungan tamu dari luar daerah	Terlaksananya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0,00	28990 Unit	1.152.450,00	36237 Unit	1.440.562,50	36237 Unit	1.440.562,50	Bagian Umum	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah/ Perjalanan Dinas	Terlaksananya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Kali	1.864.550,00	15 Kali	0,00	0	0,00	0	0,00	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum Rapat-rapat Kegiatan Pansus, Komisi, AKD dan Rapat Sekretariat DPRD dengan SKPD	Terlaksananya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0,00	38857 Unit	1.864.550,00	48571 Unit	2.330.687,50	48571 Unit	2.330.687,50	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Digitalisasi Arsip	Terlaksananya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD											
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2021		2022		2023		TARGET	RP		
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan laptop, PC Komputer All In One, Printer, AC Tablet, Drone dan Kamera	Terlaksananya Kegiatan Pada Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0,00	65 laptop 10 Tablet 7 PC Komputer all in one 15 AC 15 Printer 2 Kamera 1 Drone	3.100.000,00	65 laptop 10 Tablet 7 PC Komputer all in one 15 AC 15 Printer 2 Kamera 1 Drone	3.100.000,00	65 laptop 10 Tablet 7 PC Komputer all in one 15 AC 15 Printer 2 Kamera 1 Drone	3.100.000,00	Bagian Umum	
4	02	01				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD											
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen surat terkirim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah	1002 Surat/ Paket	50.000,00	676 Surat/ Paket	50.000,00	845 Surat/ Paket	62.500,00	845 Surat/ Paket	62.500,00	Bagian Umum	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Telepon, dan Internet	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah	143 Unit	750.000,00	143 Unit	750.000,00	143 Unit	750.000,00	143 Unit	750.000,00	Bagian Umum	
				Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik		192 Rekening/Bulan		192 Rekening/Bulan		192 Rekening/Bulan							
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Retribusi Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah	1248 Orang/ Bulan	5.575.248,00	12 Bulan	5.611.849,98	12 Bulan	7.014.812,48	12 Bulan	7.014.812,48	Bagian Program dan Keuangan	
				Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran				1224 Orang/Tahun		1224 Orang/Tahun							
4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD											
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah												

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2021		2022		2023		TARGET	RP		
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4 Unit	300.000,00	4 Unit	300.000,00	4 Unit	375.000,00	4 Unit	375.000,00	Bagian Umum	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	37 Unit	550.000,00	31 Unit	550.000,00	31 Unit	687.500,00	31 Unit	687.500,00	Bagian Umum	
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	250 Unit	200.000,00	1 Paket	100.000,00	1 Paket	125.000,00	1 Paket	125.000,00	Bagian Umum	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	211 Unit	500.000,00	874 Unit	300.000,00	874 Unit	375.000,00	874 Unit	375.000,00	Bagian Umum	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	24757 M2	4.200.000,00	23045 M2; dan 2 Paket	4.000.000,00	24757 M2	5.000.000,00	24757 M2	5.000.000,00	Bagian Umum	
4	02	02				Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD											
4	02	02	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD												
4	02	02	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi	Terfasilitasi Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	600 Orang/ Bulan	45.007.950,00	600 Orang/ Bulan	63.007.950,00	600 Orang/ Bulan	78.759.937,50	600 Orang/ Bulan	78.759.937,50	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	02	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD	Terfasilitasinya Pelayanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	150 Stel	700.000,00	150 Stel	700.000,00	150 Stel	875.000,00	150 Stel	875.000,00	Bagian Program dan Keuangan	

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2021		2022		2023				TARGET	RP
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)				(RIBUAN)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	02	02	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD	Terfasilitasinya Pelayanan Keschatan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	50 Orang	150.000,00	50 Orang	150.000,00	50 Orang	187.500,00	50 Orang	187.500,00	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	02	2.16		Layanan Administrasi DPRD												
4	02	02	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, HUT Kota Bekasi dan HUT RI		22 Kali	1.100.000,00		0,00		0,00	0	0,00	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	02	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		0,00	1 Tahun	750.000,00	1 Tahun	937.500,00	1 Tahun	937.500,00	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA										SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD												
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda Inisiatif, Propemperda dan Kajian Produk Hukum	Terbentuknya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah	14 Produk Hukum	6.277.520,00	15 Produk Hukum	1.000.000,00	16 Produk Hukum	1.250.000,00	16 Produk Hukum	1.250.000,00	Bagian Persidangan dan PerUndang- Undangan	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda Inisiatif, Propemperda dan Kajian Produk Hukum	Terbentuknya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah	15 Raperda	8.700.000,00	15 Raperda	8.750.000,00	17 Raperda	10.937.500,00	17 Raperda	10.937.500,00	Bagian Persidangan dan PerUndang- Undangan	

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2021		2022		2023		TARGET	RP		
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan	Terbentuknya Propemperda, Terselenggaranya Kajian Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah	0	0,00	6 kajian	3.250.000,00	6 kajian	4.062.500,00	6 kajian	4.062.500,00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Naskah Akademik	Terbentuknya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah dan Tersusunnya Naskah Akademik	0	0,00	10 Raperda Inisiatif dan NA	5.750.000,00	10 Raperda Inisiatif dan NA	7.187.500,00	10 Raperda Inisiatif dan NA	7.187.500,00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tata Tertib DPRD	Terbentuknya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif, Peraturan Daerah dan Tersusunnya Tata Tertib DPRD	0	0,00	1 Tatib DPRD	450.000,00	1 Tatib DPRD	562.500,00	1 Tatib DPRD	562.500,00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
4	02	02				Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD										SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran												

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2021		2022		2023		TARGET	RP		
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD	Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD	1 Dokumen	1.040.000,00	1 Dokumen	1.050.000,00	1 Dokumen	1.312.500,00	1 Dokumen	1.312.500,00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan	Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD	1 Dokumen	1.040.000,00	1 Dokumen	1.050.000,00	1 Dokumen	1.312.500,00	1 Dokumen	1.312.500,00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD Murni	Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD	1 Dokumen	1.040.000,00	1 Dokumen	1.050.000,00	1 Dokumen	1.312.500,00	1 Dokumen	1.312.500,00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD	1 Dokumen	1.040.000,00	1 Dokumen	1.050.000,00	1 Dokumen	1.312.500,00	1 Dokumen	1.312.500,00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen LRA Semester I dan Prognosis APBD sampai Akhir Tahun	Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD	1 Dokumen	1.040.000,00	1 Dokumen	1.050.000,00	1 Dokumen	1.312.500,00	1 Dokumen	1.312.500,00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Perda LP2APBD	Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD	1 Dokumen	1.040.000,00	1 Dokumen	1.050.000,00	1 Dokumen	1.312.500,00	1 Dokumen	1.312.500,00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02				Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD										SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan												

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2021		2022		2023				TARGET	RP
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	02	02	2.03	01	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	7 Dokumen	2.590.515,80	4 Dokumen	90.120,00	7 Dokumen	112.650,00	7 Dokumen	112.650,00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	7 Dokumen	2.265.746,05	4 Dokumen	90.120,00	7 Dokumen	112.650,00	7 Dokumen	112.650,00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	7 Dokumen	2.469.746,05	4 Dokumen	90.120,00	7 Dokumen	112.650,00	7 Dokumen	112.650,00	Bagian Fasilitasi Penganggara n dan Pengawasan	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	7 Dokumen	2.106.836,05	4 Dokumen	90.120,00	7 Dokumen	112.650,00	7 Dokumen	112.650,00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rekomendasi DPRD atas Tindaklanjut LHP BPK	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	1 Dokumen	1.200.000,00	1 Dokumen	1.500.600,00	1 Dokumen	1.875.750,00	1 Dokumen	1.875.750,00	Bagian Fasilitasi Penganggara n dan Pengawasan	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Rekomendasi DPRD atas Kebijakan Anggaran DPRD	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	1 Dokumen	2.200.000,00	1 Dokumen	4.150.000,00	1 Dokumen	5.187.500,00	1 Dokumen	5.187.500,00	Bagian Fasilitasi Penganggara n dan Pengawasan	
4	02	02	2.08	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah	Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	2.456.988,00	1 Dokumen	3.071.235,00	1 Dokumen	3.071.235,00	Bagian Fasilitasi Penganggara n dan Pengawasan	
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			-	-	-	-	-	-	-	-		
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Peserta Bimtek /Workshop/R aker/Seminar	Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD	300 Orang	6.604.035,00	275 Orang/ Kegiatan	8.200.000,00	275 Orang/ Kegiatan	10.250.000,00	275 Orang/ Kegiatan	10.250.000,00	Bagian Umum	

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN							KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
								2021		2022		2023		TARGET	RP		
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Jumlah Peserta Workshop Nasional, Munas, Rakernas	Kota Bekasi			300 Orang/ Kegiatan		300 Orang/ Kegiatan		300 Orang/ Kegiatan			
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Buku Peraturan DPRD,Jumlah Buku Tatib DPRD,Jumlah Buku Kode Etik DPRD,Jumlah Buku Tata Hukum Beracara DPRD	Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD Kota Bekasi dan Sekretariat DPRD	200 Buku	50.000,00	250 Buku	50.000,00	250 Buku	62.500,00	250 Buku	62.500,00	Bagian Persidangan dan PerUndang- Undangan	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kajian/Telaahan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD	Terselenggaranya Kelompok Pakar dan Tim Ahli DPRD	18 Kali/ Kajian	2.500.000,00	204 Kajian/Tahun 12 Materi	1.945.612,00	204 Kajian/Tahun 12 Materi	2.432.015,00	204 Kajian/Tahun 12 Materi	2.432.015,00	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Kajian/Telaahan Tenaga Ahli Fraksi	Terselenggaranya Ahli Fraksi DPRD	0	(digabung)	72 Kajian/Tahun	576.000,00	72 Kajian/Tahun	720.000,00	72 Kajian/Tahun	720.000,00	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Sosialisasi 4 Pilar, Jumlah Media Gathering	Terlaksananya Kegiatan Hubungan Masyarakat	8 Kali	20.500.000,00	2 kali 1 kali	11.664.590,00	2 kali 1 kali	14.580.737,50	2 kali 1 kali	14.580.737,50	Bagian Persidangan dan PerUndang- Undangan	
						Jumlah Coffee Morning, Jumlah Sosialisasi melalui Adventorial Cetak dan Online				1 kali 47 kali		1 kali 47 kali					
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Hasil Pembahasan Agenda Renja DPRD dan Evaluasi Renja DPRD	Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD Kota Bekasi	1 Dokumen	1.300.000,00	2 Dokumen	1.000.000,00	2 Dokumen	1.250.000,00	2 Dokumen	1.250.000,00	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat												
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	1 Dokumen	500.000,00	3 Dokumen	405.975,00	3 Dokumen	507.468,75	3 Dokumen	507.468,75	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2021		2022		2023				TARGET	RP
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)				(RIBUAN)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.000.000,00	3 Dokumen	25.000,00	3 Dokumen	31.250,00	3 Dokumen	31.250,00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Laporan Reses DPRD	Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah	1 Dokumen	8.650.000,00	3 Dokumen	10.816.825,00	3 Dokumen	13.521.031,25	3 Dokumen	13.521.031,25	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD												
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Internal DPRD	1 Dokumen	1.000.170,00	10 Laporan	0,00	0	0,00	0	0,00	Bagian Fasilitas Pengangara n dan Pengawasan	
4	02	02				Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD										SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerjasama Daerah			-	-	-	-	-	-	-	-		
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Baliho	Terpublikasinya Kegiatan DPRD Kota Bekasi	30 Unit Baliho, 4000 eksemplar, 50 kali, 7 unit, 950 unit, 68 kali	4.000.000,00	30 Buah	3.450.000,00	30 Buah	4.312.500,00	30 Buah	4.312.500,00	Bagian Persidangan dan PerUndang- Undangan	
						Jumlah Majalah				4000 Eksemplar		4000 Eksemplar		4000 Eksemplar			
						Jumlah Peliputan				50 Kali		50 Kali		50 Kali			
						Jumlah Souvenir				950 Buah		950 Buah		950 Buah			
						Kerjasama Media Cetak				10 Media		10 Media		10 Media			

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	HASIL KEGIATAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
								2021		2022		2023				TARGET	RP
								TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
									(RIBUAN)		(RIBUAN)		(RIBUAN)				
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Kerjasama Media Elektronik				70 Media		70 Media		70 Media			
4	02	02				Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD										SEKRETARIAT DPRD	
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan Pimpinan DPRD	23 Kali	8.425.613,05	159 kali	34.512.838,00	159 kali	43.141.047,50	159 kali	43.141.047,50	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan Pimpinan DPRD	0	0,00	1 Dokumen	500.000,00	1 Dokumen	625.000,00	1 Dokumen	625.000,00	Bagian Program dan Keuangan	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Pimpinan Badan Musyawarah dan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Paripurna HUT RI serta Paripurna HUT Kota Bekasi	Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan DPRD	70 Kali	5.000.000,00	95 Kali	1.739.550,00	95 Kali	2.174.437,50	95 Kali	2.174.437,50	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Kegiatan Pimpinan DPRD	Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan DPRD	0	0,00	36 Kali	1.825.030,00	36 Kali	2.281.287,50	36 Kali	2.281.287,50	Bagian Program dan Keuangan	
									177.941.702,00		209.434.800,98		260.831.001,23		260.831.001,23		

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

IV.1. Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu dalam penyusunan perencanaan pembangunan, harus memastikan Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Bekasi terpilih periode Tahun 2018-2023 tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja), maka dilaksanakan program perencanaan pembangunan daerah dengan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJMD Tahun 2021-2023 sampai dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Di samping itu, untuk menjabarkan RPJMD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan dilaksanakan kegiatan penyusunan RKPD Tahun 2021 dilaksanakan pada tahun anggaran 2022, dengan didukung kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk memastikan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi (RPJMD dan RKPD) dijabarkan dalam perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja).

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan demikian, pada tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan melaksanakan 2 (dua) program, yang terdiri dari 1 (satu) program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Perubahan Tahun 2021-2023, yaitu:

I. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota

1. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Hasil : 100%.

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja.
Hasil : Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel.
Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen LKIP, SAKIP, dan LPPD.
Hasil : Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel.
Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Hasil : 100%.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.
Hasil : Terfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : ASN, Sekretariat DPRD dan DPRD.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan DPRD.

Hasil : Terfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : ASN, Sekretariat DPRD dan DPRD.

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD dan DPRD, Jumlah Laporan Keuangan Triwulan SKPD dan DPRD, Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan DPRD.

Hasil : Terfasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : ASN, Sekretariat DPRD dan DPRD.

3. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Disiplin Aparatur.

Hasil : 100%.

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Jumlah Pakaian Dinas, Olahraga dan Batik bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan pada Program

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Aparatur Sekretariat DPRD Kota
Bekasi.

2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peserta Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai berdasarkan
Tugas dan Fungsi bagi ASN
Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan
Kegiatan pada Program
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Aparatur Sekretariat DPRD Kota
Bekasi.

3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peserta Bimbingan
Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan.

Hasil : Terlaksananya Penyelenggaraan
Kegiatan pada Program
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Aparatur Sekretariat DPRD Kota
Bekasi.

4. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

Hasil : 100%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor.

Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Alat Tulis Kantor, Jumlah Orang/Kali Mamin Harian Pegawai, Rapat, Tamu dan Pengamanan.

Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Barang Cetak, Jumlah Penggandaan/Penjilidan.

Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan.

- Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

6) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Perjalanan Dinas.
- Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

7) **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**

- Indikator Keluaran (Output) : Digitalisasi Arsip.
- Hasil : Terlaksananya Kegiatan pada Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

e. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Surat Terkirim.
- Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah.
- Kelompok Sasaran : Pemerintah Kota Bekasi dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pemeliharaan Jaringan Telepon, Internet, dan Internet, Jumlah Rekening Telepon, Internet, Air dan Listrik.
- Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah.

Kelompok Sasaran : Pemerintah Kota Bekasi dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran yang disediakan, Jumlah Retribusi Jasa Kebersihan Kantor.

Hasil : Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah.

Kelompok Sasaran : Pemerintah Kota Bekasi dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

5. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Disiplin Aparatur.

Hasil : 100%.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan.

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3) Pemeliharaan Mebel

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Mebeleur.

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat
DPRD Kota Bekasi.

4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peralatan Gedung Kantor
yang dipelihara.

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat
DPRD Kota Bekasi.

5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peralatan Gedung Kantor
yang dipelihara.

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat
DPRD Kota Bekasi.

6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Keluaran (Output) : Luas Gedung Kantor.

Hasil : Terlaksananya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat
DPRD Kota Bekasi.

6. Indikator Kinerja (Outcome) : Terlaksananya Tata Pemerintahan yang
baik.

Hasil : 100%.

g. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pembayaran Gaji dan
Tunjangan Anggota DPRD Kota
Bekasi.

Hasil : Terfasilitasinya Pelayanan
Keuangan dan Kesejahteraan

DPRD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD Kota Bekasi.

2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD.

Hasil : Terfasilitasinya Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD Kota Bekasi.

3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD.

Hasil : Terfasilitasinya Pelayanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD Kota Bekasi.

7. Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Disiplin Aparatur.

Hasil : 100%.

h. Layanan Administrasi DPRD

4) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Pelaksanaan Rapat-rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Jumlah Rangkaian HUT Kota Bekasi dan HUT RI.

Hasil : Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD.

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD, Sekretariat DPRD, Pemerintah Kota Bekasi dan Tamu Undangan.

II. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Indikator Kinerja (Outcome) : Persentase Terpenuhinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD.
- Hasil : LHP-BPK, LP2APBD, KUA PPAS Murni, KUA PPAS, APBD Murni, APBD.

a. Pembahasan Kebijakan Anggaran

1) Pembahasan KUA dan PPAS

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD
- Hasil : Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD.
- Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

2) Pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen KUA Perubahan dan PPAS Perubahan.
- Hasil : Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD.
- Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

3) Pembahasan APBD

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen APBD Murni.
- Hasil : Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD.
- Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

4) **Pembahasan APBD Perubahan**

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen APBD Perubahan.
- Hasil : Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD.
- Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

5) **Pembahasan Laporan Semester**

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen LRA Semester I dan Progonis APBD sampai Akhir Tahun.
- Hasil : Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD.
- Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

6) **Pembahasan Pertanggungjawaban APBD**

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Perda Pertanggungjawaban APBD.
- Hasil : Terlaksananya Fungsi Budgeting DPRD dalam Pengelolaan APBD.
- Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD se Kota Bekasi.

2. Indikator Kinerja (Outcome) : Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan Perda.
- Hasil : Naskah Akademis dan Raperda Inisiatif, Propemperda Naskah Akademis dan Raperda Inisiatif, Kajian/Telaahan Naskah Akademis Dan Raperda

Inisiatif, Rekomendasi dan Peraturan DPRD.

b. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Produk Hukum (Raperda Inisiatif, Propemperda).
- Hasil : Terbentuknya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah.
- Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

2) Pembahasan Rancangan Perda

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Raperda menjadi Perda, Rekomendasi, dan Peraturan DPRD.
- Hasil : Terbentuknya Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Peraturan Daerah.
- Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

3. Indikator Kinerja (Outcome) : Persentase Terasilitasinya Kegiatan DPRD.

- Hasil : Terasilitasinya Fungsi Pengawasan DPRD, Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah, Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan Pimpinan DPRD.

c. **Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**

1) **Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

2) **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Infrastruktur.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

3) **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

4) **Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

5) **Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Rekomendasi DPRD atas Tindaklanjut LHP BPK.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

6) **Pengawasan Penggunaan Anggaran**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Rekomendasi DPRD atas Hasil Pengawasan Anggaran.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

7) **Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Rekomendasi DPRD atas LKPJ Wali Kota dan Kebijakan Anggaran DPRD.

Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan DPRD.

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, OPD dan Masyarakat Kota Bekasi.

d. **Peningkatan Kapasitas DPRD**

1) **Pendalaman Tugas DPRD**

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Peserta Bimtek/ Workshop/ Raker/ Seminar, Jumlah Perserta Workshop Nasional, Munas, Rakernas (ADEKSI).

Hasil	: Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
Kelompok Sasaran	: DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Buku Tatib DPRD, Jumlah Buku Kode Etik DPRD, Jumlah Buku Tata Hukum Beracara DPRD.
Hasil	: Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
Kelompok Sasaran	: DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Kajian/Telaahan Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli.
Hasil	: Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
Kelompok Sasaran	: DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Kajian/Telaahan Tenaga Ahli Fraksi.
Hasil	: Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
Kelompok Sasaran	: DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

5) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Focus Group Discussion (FGD) Anggota DPRD, Jumlah Gathering Media Center dan Parlementaria.
- Hasil : Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
- Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

6) Penyusun Program Kerja DPRD

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Penyusunan dan Hasil Pembahasan Agenda.
- Hasil : Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
- Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Masyarakat Kota Bekasi.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

1) Kunjungan Kerja dalam Daerah

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kegiatan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat.
- Hasil : Terlaksananya Jaring Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.
- Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD serta Masyarakat Kota Bekasi.

2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

- Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- Hasil : Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD serta Masyarakat Kota Bekasi.

3) Pelaksanaan Reses

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Kegiatan Reses DPRD.
Hasil : Terlaksananya Reses DPRD.
Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD serta Masyarakat Kota Bekasi.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

1) Pengawasan Kode Etik DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD.
Hasil : Terlaksananya Fungsi Pengawasan Internal DPRD.
Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi, Sekretariat DPRD.

g. Fasilitasi Tugas DPRD

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi.
Hasil : Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan Pimpinan DPRD.
Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD.
Hasil : Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan Pimpinan DPRD.
Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

3) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah

Indikator Keluaran (Output) : Jumlah Rapat-rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD

	Kota Bekasi.
Hasil	: Tersusunnya Agenda DPRD dan Kebijakan Pimpinan DPRD.
Kelompok Sasaran	: Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

h. Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD

Indikator Kinerja (Outcome)	: Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD.
Hasil	: Terpublikasi dan Terfasilitasi Kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.

1) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

Indikator Keluaran (Output)	: Jumlah Baliho, Jumlah Majalah, Jumlah Peliputan, Pemeliharaan Media Informasi DPRD, Pemeliharaan Website, Jumlah Souvenir, Kerjasama Media Cetak, Kerjasama Media Elektronik.
Hasil	: Terpublikasinya kegiatan DPRD Kota Bekasi.
Kelompok Sasaran	: DPRD, Masyarakat Kota Bekasi dan Media Massa.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI
TAHUN 2023

Sub Kegiatan		Pagu Rencana Awal	Pagu Sebelum Desk	Desk I	Pagu Validasi	Desk II	Pagu Final	Keterangan
4.02 SEKRETARIAT DPRD								
01.00 Sekretariat DPRD		260.831.001.225	204.000.000.000	- 1.401.083.436	202.598.916.564	676.289.000	201.975.374.890	Efisiensi
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		122.481.641.225	93.622.486.040	5.076.053.436	88.546.432.604	200.000.000	92.011.379.930	Efisiensi
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		634.375.000	634.375.000	233.560.000	400.815.000	50.000.000	245.815.000	
1	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	625.000,000	625.000.000	- 585.000.000	40.000.000		40.000.000	
2	4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.375,000	9.375.000	351.440.000	360.815.000	50.000.000	205.815.000	Efisiensi
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.923.375.000	11.141.200.000	431.790.000	11.572.990.000	50.000.000	11.365.790.000	
3	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.910.875,000	11.128.700.000	-	11.128.700.000		11.128.700.000	
4	4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.500,000	12.500.000	431.790.000	444.290.000	50.000.000	237.090.000	Efisiensi
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.022.937.500	1.218.350.000	- 498.350.000	720.000.000	100.000.000	620.000.000	
5	4.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		400.000.000	- 400.000.000			0	Ditiadakan
6	4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	372.937.500	298.350.000	- 98.350.000	200.000.000	100.000.000	100.000.000	Efisiensi
7	4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	650.000.000	520.000.000	-	520.000.000		520.000.000	

Sub Kegiatan		Pagu Rencana Awal	Pagu Sebelum Desk	Desk I	Pagu Validasi	Desk II	Pagu Final	Keterangan
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.651.203.750	5.477.329.562	233.800.000	5.711.129.562		5.502.329.562	
8	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	62.500,000	50.000.000	25.000.000	75.000.000		75.000.000	Penambahan Gedung Baru
9	4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.467.453,750	2.637.763.000	104.400.000	2.742.163.000		2.637.763.000	
10	4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	625.000,000	429.116.562	-	429.116.562		429.116.562	
11	4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	725.000,000	580.000.000	104.400.000	684.400.000		580.000.000	
12	4.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	1.440.562,500	1.152.450.000	-	1.152.450.000		1.152.450.000	
13	4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.330.687,500	628.000.000	-	628.000.000		628.000.000	
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.100.000.000	1.300.000.000	-	1.300.000.000		1.300.000.000	
14	4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.100.000,000	1.300.000.000	-	1.300.000.000		1.300.000.000	
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.827.312.475	6.742.531.478	- 4.503.600.000	2.238.931.478		6.741.178.804	
15	4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62.500,000	50.000.000	934.800.000	984.800.000		50.000.000	
16	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	750.000,000	950.000.000	-	950.000.000		950.000.000	
17	4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.014.812,475	5.742.531.478	- 5.438.400.000	304.131.478		5.741.178.804	
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		6.562.500.000	8.500.750.000	- 610.233.436	7.890.516.564		7.628.316.564	

Sub Kegiatan		Pagu Rencana Awal	Pagu Sebelum Desk	Desk I	Pagu Validasi	Desk II	Pagu Final	Keterangan
18	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	375.000,000	300.000.000	-	300.000.000		300.000.000	
19	4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	687.500,000	550.000.000	52.200.000	602.200.000		550.000.000	
20	4.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	125.000,000	100.000.000	-	100.000.000		100.000.000	
21	4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	375.000,000	300.000.000	-	300.000.000		300.000.000	
22	4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,000	7.250.750.000	-	6.588.316.564		6.378.316.564	Efisiensi
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		79.822.437.500	57.857.950.000	104.100.000	57.962.050.000		57.857.950.000	
23	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	78.759.937,500	57.007.950.000	104.100.000	57.112.050.000		57.007.950.000	
24	4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	875.000,000	700.000.000	-	700.000.000		700.000.000	
25	4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	187.500,000	150.000.000	-	150.000.000		150.000.000	
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		937.500.000	750.000.000	-	750.000.000		750.000.000	
26	4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	937.500,000	750.000.000	-	750.000.000		750.000.000	
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		138.349.360.000	110.377.513.960	3.674.970.000	114.052.483.960	476.289.000	109.963.994.960	
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		24.000.000.000	19.200.000.000	420.600.000	19.620.600.000		19.200.000.000	

Sub Kegiatan		Pagu Rencana Awal	Pagu Sebelum Desk	Desk I	Pagu Validasi	Desk II	Pagu Final	Keterangan
27	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.250.000,000	1.000.000.000	104.400.000	1.104.400.000		1.000.000.000	
28	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10.937.500,000	8.750.000.000	105.600.000	8.855.600.000		8.750.000.000	
29	4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	4.062.500,000	3.250.000.000	105.000.000	3.355.000.000		3.250.000.000	
30	4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	7.187.500,000	5.750.000.000	105.600.000	5.855.600.000		5.750.000.000	
31	4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD	562.500,000	450.000.000	-	450.000.000		450.000.000	
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		7.875.000.000	6.300.000.000	244.600.000	6.544.600.000		6.300.000.000	
32	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	1.312.500,000	1.050.000.000	61.150.000	1.111.150.000		1.050.000.000	
33	4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.312.500,000	1.050.000.000	30.575.000	1.080.575.000		1.050.000.000	
34	4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	1.312.500,000	1.050.000.000	61.150.000	1.111.150.000		1.050.000.000	
35	4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	1.312.500,000	1.050.000.000	30.575.000	1.080.575.000		1.050.000.000	
36	4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester	1.312.500,000	1.050.000.000	30.575.000	1.080.575.000		1.050.000.000	
37	4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.312.500,000	1.050.000.000	30.575.000	1.080.575.000		1.050.000.000	
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		10.585.085.000	26.864.096.960	856.100.000	27.720.196.960		26.864.096.960	
38	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	112.650,000	4.689.127.240	210.000.000	4.899.127.240		4.689.127.240	
39	4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	112.650,000	4.689.127.240	105.000.000	4.794.127.240		4.689.127.240	

Sub Kegiatan		Pagu Rencana Awal	Pagu Sebelum Desk	Desk I	Pagu Validasi	Desk II	Pagu Final	Keterangan
40	4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	112.650,000	4.689.127.240	209.400.000	4.898.527.240		4.689.127.240	
41	4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	112.650,000	4.689.127.240	209.400.000	4.898.527.240		4.689.127.240	
42	4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1.875.750,000	1.500.600.000	30.575.000	1.531.175.000		1.500.600.000	
43	4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran	5.187.500,000	4.150.000.000	91.725.000	4.241.725.000		4.150.000.000	
44	4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3.071.235,000	2.456.988.000	-	2.456.988.000		2.456.988.000	
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		29.295.252.500	22.802.189.000	1.110.000.000	23.912.189.000	476.289.000	22.860.900.000	
45	4.02.02.2.04.02 Pendalaman Tugas DPRD	10.250.000,000	8.200.000.000	-	8.200.000.000		8.200.000.000	
46	4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	62.500,000	50.000.000	-	50.000.000	0	0	Ditiadakan
47	4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.432.015,000	2.521.612.000	105.600.000	2.627.212.000		2.521.612.000	
48	4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	720.000,000	576.000.000	105.600.000	681.600.000		576.000.000	
49	4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	14.580.737,500	10.454.577.000	313.800.000	10.768.377.000	476.289.000	9.978.288.000	Efisiensi
50	4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	1.250.000,000	1.000.000.000	585.000.000	1.585.000.000		1.585.000.000	Kegiatan Sinergitas DPRD dan OPD
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		14.059.750.000	12.447.800.000	469.200.000	12.917.000.000		12.447.800.000	
51	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	507.468,750	405.975.000	156.400.000	562.375.000		405.975.000	

Sub Kegiatan		Pagu Rencana Awal	Pagu Sebelum Desk	Desk I	Pagu Validasi	Desk II	Pagu Final	Keterangan
52	4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	31.250,000	1.225.000.000	156.400.000	1.381.400.000		1.225.000.000	
53	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	13.521.031,250	10.816.825.000	156.400.000	10.973.225.000		10.816.825.000	
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		0	3.036.268.000	52.800.000	3.089.068.000		3.089.068.000	
54	4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	0	3.036.268.000	52.800.000	3.089.068.000		3.089.068.000	
4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah		4.312.500.000		-			0	
55	4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	4.312.500.000	-	-			0	
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD		48.221.772,500	19.727.160.000	521.670.000	20.248.830.000		19.202.130.000	
56	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	43.141.047,500	8.245.820.000	-	8.245.820.000		8.245.820.000	
57	4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	625.000,000	500.000.000	157.500.000	657.500.000		500.000.000	
58	4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.174.437,500	9.156.310.000	367.200.000	9.523.510.000		9.156.310.000	
59	4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.281.287,500	1.825.030.000	- 3.030.000	1.822.000.000		1.300.000.000	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
						2021	

							PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019		PERENCANAAN	TARGET	RP			
											(RIBUAN)			
1	2	3					4	5	6	7	8	15	1	
Meningkatkan Fasilitas Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	4	02	01			Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD						
		4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD,Evaluasi Renja DPRD Tahun 2022,Dokumen Renja DPRD,Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat,Dokumen Laporan Evaluasi Capaian Kinerja,Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD,Dokumen Renstra 2018-2023,Sinergitas DPRD dengan OPD		23 Dokumen	500,000.00	Bagian Program dan Keuangan		
		4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Dokumen	40,000.00	Bagian Program dan Keuangan		
		4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat DPRD						

		4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Daerah						
		4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns		720 Orang/ Bulan	12,509,864.00	Bagian Program dan Keuangan	
						Jumlah Orang Gaji dan Tunjangan ASN							
		4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan DPRD		2 Dokumen	10,000.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan SKPD dan DPRD		24 Dokumen	10,000.00	Bagian Program dan Keuangan	
						Jumlah Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan DPRD			4 Dokumen				
						Jumlah Laporan Keuangan Triwulanan SKPD dan DPRD			8 Dokumen				
		4	02	01				Optimalisasi Disiplin Aparatur Sekretariat DPRD					
		4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
		4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi		239 set	700,000.00	Bagian Program dan Keuangan	
						Jumlah Pakaian Dinas, Olah Raga dan Batik bagi Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi			691 Stel/buah				
		4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD					

		4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
		4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan		59 Orang	500,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Workshop Nasional, Munas, Rakernas, Rakornas Sekretariat DPRD, Workshop Nasional		63 Orang	736,665.00	Bagian Umum	
		4	02	01				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD					
		4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		2383 Unit	50,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		55 Unit	3,545,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor		0	0.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer		4491 Unit, 84158 Pak	3,732,243.00	Bagian Umum	
							Jumlah Makanan dan Minuman Pimpinan, Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Pengamanan Unras						
		4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang	Jumlah Barang Cetakan		4952 Unit	500,000.00	Bagian Umum	

						Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan/ Penjilidan		236968 Lembar			
		4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		26200 Buku/ Eksemplar	580,000.00	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
		4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum kunjungan tamu dari luar daerah		0	0.00	Bagian Umum
		4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Frekuensi Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah/ Perjalanan Dinas		14 Kali	1,864,550.00	Bagian Program dan Keuangan
		4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum Rapat-rapat Kegiatan Pansus, Komisi, AKD dan Rapat Sekretariat DPRD dengan SKPD		0	0.00	Bagian Program dan Keuangan
		4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Digitalisasi Arsip		0	0.00	Bagian Program dan Keuangan
		4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD				
		4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

		4	02	01	2.07	01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan laptop, PC Komputer All In One, Printer, AC Tablet, Drone dan Kamera		0	0.00	Bagian Umum	
		4	02	01				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD					
		4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
		4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen surat terkirim		1002 Surat/Paket	50,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Telepon, dan Internet		143 Unit	750,000.00	Bagian Umum	
								Jumlah Rekening Telepon, Air dan Listrik		192 Rekening/Bulan			
		4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Retribusi Jasa Kebersihan Kantor		1248 Orang/Bulan	5,575,248.00	Bagian Program dan Keuangan	
								Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran					
		4	02	01				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD					
		4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah						

		4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan		4 Unit	300,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional		37 Unit	550,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair		250 Unit	200,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara		211 Unit	500,000.00	Bagian Umum	
		4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Luas Gedung Kantor yang dipelihara		24757 M2	4,200,000.00	Bagian Umum	
		4	02	02				Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD					
		4	02	02	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						

		4	02	02	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pembayaran Gaji, Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi			45,007,950.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Anggota DPRD			700,000.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Medical Check Up Pimpinan dan Anggota DPRD			150,000.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.16		Layanan Administrasi DPRD						
		4	02	02	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat-rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, HUT Kota Bekasi dan HUT RI		22 Kali	1,100,000.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			0.00	Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA				SEKRETARIAT DPRD	
		4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						

		4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda Inisiatif, Propemperda dan Kajian Produk Hukum		14 Produk Hukum	6,277,520.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
		4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Raperda Inisiatif, Propemperda dan Kajian Produk Hukum		15 Raperda	8,700,000.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
		4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Kajian Perundang-undangan		0	0.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
		4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dan Naskah Akademik		0	0.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
		4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tata Tertib DPRD		0	0.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	

		4	02	02				Persentase Terpenuhiya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD					SEKRETARIAT DPRD	
		4	02	02	2.02			Pembahasan Kebijakan Anggaran						
		4	02	02	2.02	01		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS APBD		1 Dokumen	1,040,000.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.02	02		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS Perubahan		1 Dokumen	1,040,000.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.02	03		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen APBD Murni		1 Dokumen	1,040,000.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.02	04		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen APBD Perubahan		1 Dokumen	1,040,000.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.02	05		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen LRA Semester I dan Prognosis APBD sampai Akhir Tahun		1 Dokumen	1,040,000.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

		4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Perda LP2APBD		1 Dokumen	1,040,000.00	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02				Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD				SEKRETARIAT DPRD	
		4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						
		4	02	02	2.03	01	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		7 Dokumen	2,590,515.80	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.03	02	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		7 Dokumen	2,265,746.05	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.03	03	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		7 Dokumen	2,469,746.05	Bagian Fasilitasi Penganggara n dan Pengawasan	
		4	02	02	2.03	04	Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		7 Dokumen	2,106,836.05	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	

		4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rekomendasi DPRD atas Tindakan Lanjut LHP BPK		1 Dokumen	1,200,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Rekomendasi DPRD atas Kebijakan Anggaran DPRD		1 Dokumen	2,200,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.08	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah		1 Dokumen		Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			-	-		
		4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Peserta Bimtek/Workshop/Raker/Seminar		300 Orang	6,604,035.00	Bagian Umum	
								Jumlah Peserta Workshop Nasional, Munas, Rakernas					
		4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Buku Peraturan DPRD, Jumlah Buku Tatib DPRD, Jumlah Buku Kode Etik DPRD, Jumlah Buku Tata Hukum Beracara DPRD		200 Buku	50,000.00	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	

		4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kajian/Telaahan Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD		18 Kali/ Kajian	2,500,000.00	Bagian Program dan Keuangan
		4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Kajian/Telaahan Tenaga Ahli Fraksi		0	(digabung)	Bagian Program dan Keuangan
		4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Sosialisasi 4 Pilar, Jumlah Media Gathering		8 Kali	20,500,000.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan
								Jumlah Coffee Morning, Jumlah Sosialisasi melalui Adventorial Cetak dan Online				
		4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Hasil Pembahasan Agenda Renja DPRD dan Evaluasi Renja DPRD		1 Dokumen	1,300,000.00	Bagian Program dan Keuangan
		4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
		4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyerapan Aspirasi Masyarakat		1 Dokumen	500,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan
		4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD		1 Dokumen	1,000,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan

		4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Laporan Reses DPRD		1 Dokumen	8,650,000.00	Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	
		4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						
		4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Kode Etik DPRD		1 Dokumen	1,000,170.00	Bagian Fasilitas Penganggara n dan Pengawasan	
		4	02	02				Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD				SEKRETARIAT DPRD	
		4	02	02	2.07		Pembahasan Kerjasama Daerah			-	-		
		4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Baliho		30 Unit Baliho, 4000 eksemplar, 50 kali, 7 unit, 950 unit, 68 kali	4,000,000.00	Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
						Jumlah Majalah							
						Jumlah Peliputan							
						Jumlah Souvenir							
						Kerjasama Media Cetak							
						Kerjasama Media Elektronik							

		4	02	02				Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD					SEKRETARIAT DPRD	
		4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			-	-		Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD ke Luar Daerah dan Luar Negeri		23 Kali	8,425,613.05		Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja DPRD		0	0.00		Bagian Program dan Keuangan	
		4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Pimpinan Badan Musyawarah dan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi, Paripurna HUT RI serta Paripurna HUT Kota Bekasi		70 Kali	5,000,000.00		Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan	
		4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Kegiatan Pimpinan DPRD		0	0.00		Bagian Program dan Keuangan	
											177,941,702,000.00			

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahun 2023 yang juga merupakan dokumen operasionalisasi atau penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra tersebut merupakan tindaklanjut dari adanya perubahan RPJMD Kota Bekasi di Tahun 2021.

Terdapat beberapa hal yang mendasari adanya perubahan terhadap RPJMD Kota Bekasi beberapa salah satunya adalah implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah, penurunan penerimaan daerah, dan peningkatan belanja daerah dan pembiayaan sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah daerah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah. Rencana penanganan, penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah tersebut tetap harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dan harus direspon dengan perubahan yang mendasar, salah satunya dengan melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Selain itu menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, membawa dampak adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju single codebase yang bertujuan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, akuntabel, responsible, serta reliable sesuai dengan prinsip-prinsip good governance serta Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi berdampak langsung untuk melakukan perubahan terhadap Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Proses penyusunan RENJA ini memerlukan keterlibatan dari seluruh elemen yang terkait dan berkepentingan dengan organisasi baik dari internal maupun eksternal organisasi. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi lembaga untuk melaksanakan program dan kegiatan indikatif yang terdapat dalam RENJA secara fokus dan konsisten serta meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan.


Adapun kaidah pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Bekasi;
2. Seluruh komponen bagian, sub bagian pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, agar menyempurnakan Program dan Kegiatan dalam RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya;
3. Program-program yang tercantum dalam RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023, diupayakan untuk dilaksanakan seluruhnya dengan memperhatikan prioritas pembangunan serta ketersediaan anggaran;
4. RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);
5. Agar RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap komponen Sekretariat DPRD Kota Bekasi diharapkan mengupayakan penguatan peran stakeholder dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target-target RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, Instansi terkait maupun masyarakat luas;

6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023, sebagai berikut:
- Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing bagian;
 - Sekretaris DPRD Kota Bekasi Kota Bekasi menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - Kepala Bagian melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RENJA bagian periode sebelumnya;
 - Sekretaris DPRD Kota Bekasi menyusun evaluasi RENJA berdasarkan hasil evaluasi bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
 - Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya;
 - Apabila terjadi perubahan kebijakan daerah maupun kebijakan nasional selama tahun 2023, Sekretariat DPRD Kota Bekasi akan melakukan perubahan-perubahan demi kesempurnaan Rencana Kerja Perubahan ini.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal Desember 2022

SEKRETARIS DPRD KOTA BEKASI



Drs. HANAN, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19640424 199011 1 002